PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN TARIF (TER) TERHADAP KARYAWAN TETAP PT NINDYA KARYA PADA PROYEK CWU PEMBANGUNAN RSPTN, IRC, DAN WWTP UNIVERSITAS LAMPUNG

Laporan Akhir

Oleh

REVO AFIF NUHA

2201051020



PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2025

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN TARIF (TER) TERHADAP KARYAWAN TETAP PT NINDYA KARYA PADA PROYEK CWU PEMBANGUNAN RSPTN,IRC DAN WWTP UNIVERSITAS LAMPUNG

Oleh

Revo Afif Nuha

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar AHLI MADYA PERPAJAKAN

Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2025

ABSTRAK

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN TARIF (TER) TERHADAP KARYAWAN TETAP PT NINDYA KARYA PADA PROYEK CWU PEMBANGUNAN RSPTN, IRC, DAN WWTP UNIVERSITAS LAMPUNG

Oleh

REVO AFIF NUHA

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah untuk memahami penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) terhadap karyawan tetap PT Nindya Karya pada proyek CWU pembangunan RSPTN, IRC, dan WWTP Universitas Lampung. Metode yang digunakan dalam laporan akhir ini adalah observasi ,wawancara, dan tinjauan pustaka. Data diperoleh melalui pengamatan langsung selama praktik kerja lapangan di PT Nindya Karya dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemotongan pajak. Selain itu, perhitungan pajak yang diadopsi oleh perusahaan dianalisis untuk menilai kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.03/2023.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tarif pajak pemotongan Pasal 21 yang dikombinasikan dengan TER bermanfaat untuk perhitungan pajak karyawan, karena jumlah pajak yang dipotong setiap bulannya lebih stabil. Namun, terdapat perbedaan perhitungan pada bulan Desember, karena di bulan ini digunakan tarif pajak progresif Pasal 17.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif Efektif Rata-rata, Pemotongan Pajak penghasilan 21 karyawan tetap

ABSTRACT

WITHHOLDING INCOME TAX ARTICLE 21 AT THE RATE (TER)
AGAINST PERMANENT EMPLOYEES OF PT NINDYA KARYA ON THE
CWU PROJECT FOR THE CONSTRUCTION OF RSPTN, IRC AND WWTP
UNIVERSITY LAMPUNG

By

REVO AFIF NUHA

The purpose of writing this final report is to analyze the application of Income Tax Article (ITA) 21 with Average Effective Tax Rate (TER) to permanent employees of PT Nindya Karya in the CWU project for the construction of RSPTN, IRC, and WWTP University of Lampung. The methods used in this final report are observation, interview, and literature review. Data was obtained through direct observation during field work practice at PT Nindya Karya and interviews with parties involved in the tax withholding process. In addition, the tax calculation adopted by the company is analyzed to assess its compliance with the current tax regulations, especially based on the Minister of Finance Regulation No. 168/PMK.03/2023. The results show that the use of Article 21 withholding tax rates combined with TER is beneficial for employee tax calculations, as the amount of tax withheld each month is more stable. However, there is a difference in the calculation in December, because in this month the progressive tax rate of Article 17 is used.

Keywords: Income Tax Article 21, Average Effective Rate, Withholding Tax Article 21 for permanent employees

PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ASAL 21 DENGAN TARIF (TER)
TERHADAP KARYAWAN TETAP PT
NINDYA KARYA PADA PROYEK CWU
PEMBANGUNAN RSPIN, IRC, DAN
WWTP UNIVERSITAS LAMPUNG

Nama Mahasiswa

Nomer Pokok Mahasiswa

Program Studi

Fakultas

Revo Afif Nuha

2201051020

Diploma III Perpajakan

Ekonomi dan Bismis

MENYETUJUI

Pembimbing Laporan Akhir

Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si. NIP. 19761023 200212 1 002 Koordinator Program Studi

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si NIP. 19740922 200003 2 002

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.

XUE

Penguji Utama

: Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D.

Busin

Sekretaris Penguji

Neny Desriani, S.E., M.Sc., Ale, CA.



2. Dekan Fkultas Ekonomi Dan Bisnis

NIP. 196606211990031003

Tanggal Lukus Laporan Akhir: 19 Mei 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Revo Afif Nuha

NPM : 2201051020

Prodi : D3 Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Menyatakan bahwa laporan akhir yang berjudul "PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN TARIF (TER) TERHADAP KARYAWAN TETAP PT NINDYA KARYA PADA PROYEK CWU PEMBANGUNAN RSPTN, IRC, DAN WWTP UNIVERSITAS LAMPUNG Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesangguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung

Bandar Lampung, 1 juni 2025

Yang memberikan Pernyataan

Revo Afif Nuha NPM 2201051020

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Revo Afif Nuha, lahir di Wonokarto pada tanggal 05 Desember 2003. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Almarhum Bapak Triharsono dan Ibu IndriAna .Penulis memulai pendidikan formalnya di SD N 01 Wonokarto, lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke SMP 01 Bnjar Margo dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negri 01 Bnjar Agung dan lulus pada tahun 2022.

Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif mengikuti kegiatan akademik dan juga melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Nindya Karya, yang menjadi dasar penyusunan laporan akhir ini.

Penulis berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama studi dapat bermanfaat di dunia kerja dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara.

MOTTO

"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya."

(QS. An-Najm: 39)

"Semua tempat adalah sekolah, Semua orang adalah guru."

(-Ki Hajar Dewantara)

"Tidak seperti perut, Kepala tidak akan Memperingatkanmu saat isinya kosong."

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Mengucap Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan kasih sayang-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan baik.

Laporan ini Penulis persembahkan dengan sepenuh hati kepada:

Pertama-tama, saya ingin mendedikasikan laporan ini untuk kedua orang tua saya tercinta, yang telah memberikan kekuatan dan motivasi di setiap tahap kehidupan saya. Terima kasih atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tak kenal lelah. Setiap keberhasilan saya tidak terlepas dari kerja keras dan restu kalian.

Nenek dan kakek saya selalu mendoakan saya dan memberikan dukungan spiritual secara diam-diam. Kasih sayang dan perhatian kalian terus memperkaya hidup saya hingga saat ini.

Saya juga mendedikasikan laporan ini untuk paman dan bibi saya, yang telah membantu saya, membimbing saya, dan menjadi panutan serta motivator dalam karir akademik saya, terima kasih untuk kakak saya yang selalu menyemangati saya dengan caranya sendiri, untuk semua saudara-saudari yang menemani saya dalam perjuangan saya, terima kasih atas dukungan dan kebahagiaan yang kalian berikan setiap hari.

Saya persembahkan laporan ini untuk rekan-rekan yang telah menjadi sahabat saya dalam proses belajar dan kehidupan kampus. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan semangat yang tidak pernah putus.

Saya berharap laporan akhir ini dapat menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik dan bermanfaat serta membanggakan orang-orang terkasih yang telah menemani saya dalam perjalanan ini.

SANWACANA

Alhamdulillah, Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya yang telah tercurahkan sehingga Penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir dengan baik. Solawat serta salam tak lupa Penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Laporan Akhir yang berjudul "Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Tarif (TER) terhadap Karyawan Tetap PT Nindya Karya pada Proyek CWU Pembangunan RSPTN, IRC, dan WWTP Universitas Lampung" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya Perpajakan (A.Md.Pjk) di Universitas Lampung. Dalam Penyusunan Laporan akhir ini terdapat banyak bantuan, masukan, saran, motivasi, dan dukungan oleh banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

- 1. Kedua orang tua Penulis alm Bapak Trihasono dan Ibu Indri Ana yang senantiasa selalu sabar dalam mendidik, membesarkan, dan selalu memberikan dukungan serta kebebasan apapun yang ingin Penulis jalani.
- 2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- 3. Ibu Dr.Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan.
- 4. Bapak Dr.Fitra Dharma, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan perhatian, dukungan, motivasi, semangat dan sumbangan pemikiran kepada penulis demi terselesaikannya Tugas Akhir ini.
- 5. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA dan ibu Neny Desriani, S.E., M.Sc. Ak., CA Selaku penguji dan sekertaris penguji laporan akhir ini.

6. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, pengajaran, dan ilmu pengetahuan selama

penulis menjalani proses perkuliahan.

7. Seluruh pegawai dan staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa

perkuliahan hingga penyusunan laporan akhir ini.

8. Pakde dan bude ku Terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang

tak pernah putus. Kehadiran dan nasihat-nasihat kalian selalu menjadi

sumber semangat dan ketenangan bagi saya.

9. Seseorang terdekat saya yang tidak dapat di sebutkan namanya terimaksih

atas doa dan dukungannya.

10. Saudara ku Pandu, Satria, Raid, fedo, Alfin, Arsila, terima kasih atas

kebersamaan, dukungan, dan kehangatan yang selalu kalian hadirkan.

Semoga kita semua terus menjaga silaturahmi dan saling menguatkan dalam

suka maupun duka.

11. Teman-teman seperjuangan DIII Perpajakan 2022 Dan juga teman satu kos.

Permadi, Adit, Arbas, Ihsan,dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan

satu-persatu terimakasih atas Kebersamaan dan dukungannya.

12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah

memberikan dorongan, semangat dan doanya terimakasih.

13. Terimakasih untuk Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih memiliki

berbagai kekurangan, namun besar harapan penulis agar karya sederhana ini dapat

memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung

Revo Afif Nuha

хi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
ABSTRAKii
ABSTRACTiii
PERSETUJUANError! Bookmark not defined.
MENGESAHKAN v
PERNYATAAN ORISINALITASError! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUPvii
MOTTOviii
PERSEMBAHANix
SANWACANAx
DAFTAR ISIxii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBARxvi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan
1.4 Manfaat
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 4
2.1 Pemotongan Pajak

	2.2 Pengertian pajak	4
	2.2.1. Fungsi Pajak	5
	2.2.2. Hukum Perpajakan Indonesia	5
	2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21	6
	2.4 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	6
	2.5 Tarif Efektif Rata Rata (TER)	7
	2.5.1 Golongan Tarif TER	7
	2.6 CWU Pembangunan RSPTN, IRC, dan WWTP	12
	2.6.1 Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) UNILA	12
	2.6.2 CWU (Contract Work Unit)	13
	2.6.3 IRC (Integrated Research Center)	13
	2.6.4 WWTP (Wastewater Treatment Plant)	13
B	BAB III METODE PENELITIAN	14
	DAD III METODET ENEETTIAN	
	3.1 Jenis Dan Sumber Data	
		14
	3.1 Jenis Dan Sumber Data	14
	3.1 Jenis Dan Sumber Data3.2 Metode Pengumpulan Data	14 15 15
	3.1 Jenis Dan Sumber Data3.2 Metode Pengumpulan Data3.3 Ojek Kerja Praktik	14 15 15
	 3.1 Jenis Dan Sumber Data 3.2 Metode Pengumpulan Data 3.3 Ojek Kerja Praktik 3.3.1 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktik 	14 15 15 15
	 3.1 Jenis Dan Sumber Data 3.2 Metode Pengumpulan Data 3.3 Ojek Kerja Praktik 3.3.1 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktik 3.4 Gambaran Umum Lokasi Perusahaan PKL 	14 15 15 15
	 3.1 Jenis Dan Sumber Data 3.2 Metode Pengumpulan Data 3.3 Ojek Kerja Praktik 3.3.1 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktik 3.4 Gambaran Umum Lokasi Perusahaan PKL 3.4.1 Relevansi dengan topik penelitian 	14 15 15 15 16
	 3.1 Jenis Dan Sumber Data 3.2 Metode Pengumpulan Data 3.3 Ojek Kerja Praktik 3.3.1 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktik 3.4 Gambaran Umum Lokasi Perusahaan PKL 3.4.1 Relevansi dengan topik penelitian 3.4.2 Kesempatan untuk mendalami PPh Pasal 21 	14 15 15 15 16 16
	3.1 Jenis Dan Sumber Data 3.2 Metode Pengumpulan Data 3.3 Ojek Kerja Praktik 3.3.1 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktik 3.4 Gambaran Umum Lokasi Perusahaan PKL 3.4.1 Relevansi dengan topik penelitian 3.4.2 Kesempatan untuk mendalami PPh Pasal 21 3.4.3 Kompleksitas dan ukuran perusahaan	14 15 15 15 16 16 16
	 3.1 Jenis Dan Sumber Data 3.2 Metode Pengumpulan Data 3.3 Ojek Kerja Praktik 3.3.1 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktik 3.4 Gambaran Umum Lokasi Perusahaan PKL 3.4.1 Relevansi dengan topik penelitian 3.4.2 Kesempatan untuk mendalami PPh Pasal 21 3.4.3 Kompleksitas dan ukuran perusahaan 3.5 visi dan misi Perusahaan 	14 15 15 15 16 16 16 17
	3.1 Jenis Dan Sumber Data 3.2 Metode Pengumpulan Data 3.3 Ojek Kerja Praktik 3.3.1 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktik 3.4 Gambaran Umum Lokasi Perusahaan PKL 3.4.1 Relevansi dengan topik penelitian 3.4.2 Kesempatan untuk mendalami PPh Pasal 21 3.4.3 Kompleksitas dan ukuran perusahaan 3.5 visi dan misi Perusahaan 3.5.1 visi PT Nindya Karya	14 15 15 15 16 16 17 17

3.7 Struktur Organisasi	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	. 24
4.1 Proses Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan TER	. 24
4.2 Penghasilan Karyawan PT Nindya Karya	. 26
4.3 perhitungan PPh Pasal 21 TER	. 27
4.4 Analisis Dan Evaluasi	. 28
4.4.1 Keakuratan dalam Perhitungan Pajak	. 28
4.4.2 Dampak bagi Karyawan dan Perusahaan	. 28
4.5 E-Billing	. 29
4.5.1 Pengertian E-Billing	. 29
4.5.2 Fungsi E-Billing	. 29
4.5.3 Membuat ID Billing	. 29
4.5.4 Pembayaran Pajak menggunakan E-Billing	. 31
BAB V KESIMPULAN	32
5.1 KESIMPULAN	. 32
5.2 SARAN	. 33
DAFTAR PUSTAKA	. 34
I.AMPIRAN	35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Lapisan penghasilan Bruto dan Tarif Efektif Rata Rata (TER) A7
Tabel 2.2 Lapisan penghasilan Bruto dan Tarif Efektif Rata Rata (TER) A8
Tabel 2.3 Lapisan Penghasilan Bruto Dan Tarif Efektif Rata Rata (TER) B9
Tabel 2.4 Lapisan Penghasilan Bruto Dan Tarif Efektif Rata Rata (TER) B10
Tabel 2.5 Lapisan Penghasilan Bruto Dan Tarif Efektif Rata Rata (TER) C11
Tabel 2.6 Lapisan Penghasilan Bruto Dan Tarif Efektif Rata Rata (TER) C12
Tabel 4.1 Rincian Penghasilan karyawan PT Nindya Karya 20
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 (TER)27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Perusahaan PT Nindya Karya	18
Gambar 3.2 Makna Logo PT Nindya Karya	18
Gambar 3.3 Struktur Organisasi CWU Pembangunan RSPTN,IRC,DAN V Universitas Lampung	
Gambar 4.1 login web DJP Online	29
Gambar 4.2 Menu E-Billing	30
Gambar 4.3 Pengisian Data Pembayaran	30
Gambar 4.4 ID Billing	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Undang-Undang Perubahan dari No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pajak Penghasilan Pasal 21 ini dipotong langsung oleh pemberi kerja, Kantor Pelayanan Pajak, dana pensiun atau lembaga lain yang ditunjuk untuk memotong pajak Penghasilan pasal 21 dan kemudian disetorkan ke kas negara.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi, PT Nindya Karya mempekerjakan banyak pegawai tetap, dan pada CWU Pembangunan RSPTN, IRC, Dan WWTP Universitas Lampung terdapat 38 pegawai dengan tingkat penghasilan yang beragam. Hal ini menjadikan manajemen PPh pasal 21 sebagai komponen penting dalam administrasi keuangan perusahaan. Memastikan pemotongan pajak yang akurat dengan tarif yang sesuai (TER: Tarif Efektif Rata-Rata) untuk karyawan tetap sangat penting untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan untuk mencegah kesalahan yang dapat menyebabkan risiko pajak, seperti denda administratif atau masalah kurang bayar.

Dari perspektif teoritis, studi mengenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) memiliki peran penting dalam memperdalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip pemungutan pajak yang adil dan efisien. Keadilan pajak mensyaratkan bahwa jumlah pajak yang dikenakan harus sesuai dengan kemampuan keuangan wajib pajak. Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam pemotongan pajak merupakan salah satu cara untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang digariskan dalam UU PPh.

Di sisi empiris, pengelolaan PPh Pasal 21 memiliki berbagai tantangan. Penelitian Rahmawati (2020) menyoroti bahwa banyak perusahaan menghadapi kesulitan dalam menentukan tarif pemotongan yang sesuai karena tingkat pendapatan karyawan yang bervariasi dan sifat peraturan perpajakan yang rumit. Untuk perusahaan besar seperti PT Nindya Karya, pengelolaan PPh Pasal 21 yang tepat merupakan prioritas penting.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus di PT Nindya Karya untuk meneliti implementasi pemotongan PPh Pasal 21, khususnya berfokus pada tarif efektif rata-rata untuk karyawan tetap. Data untuk penelitian ini mencakup dokumen-dokumen terkait pajak, laporan pendapatan karyawan, dan wawancara dengan individu yang bertanggung jawab atas manajemen pajak di perusahaan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana PPh Pasal 21 diterapkan di perusahaan konstruksi.

Selain memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai praktik pemotongan pajak, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis bagi PT Nindya Karya untuk meningkatkan kepatuhan dan merampingkan pengelolaan PPh Pasal 21.Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan wawasan teoritis tentang perpajakan dan manfaat praktis bagi PT Nindya Karya dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan efisiensi manajemen pajak perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dalam penelitian ini, Penulis memberi batasan masalah untuk penyederhanaan lingkup pembahasan yang lebih terfokus pada Pemotongan Pajak PPh pasal 21 atas karyawan PT Nindya Karya. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah "Bagaimana proses penerapan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif efektif rata-rata terhadap karyawan tetap di PT Nindya Karya"

1.3 Tujuan

Penulisan Laporan Akhir ini bertujuan untuk memahami proses penerapan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dengan tarif efektif rata-rata terhadap karyawan tetap di PT Nindya Karya

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan khususnya terkait penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif efektif rata-rata.
- b) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa, khususnya terkait pemotongan PPh Pasal 21.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan panduan bagi PT Nindya Karya dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan proses pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- b) Membantu perusahaan memahami kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam pengelolaan PPh Pasal 21 dan menawarkan solusi yang relevan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemotongan Pajak

Pemotongan dan pemungutan adalah dua istilah yang berbeda. Pemotongan dapat berarti memotong atau mengurangi pembayaran yang berkaitan dengan jumlah yang diterima atau dapat juga dikatakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pemotongan pajak biasanya dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan atau pihak yang membayarkan. Dan jenis pajak yang dipotong adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15.(Aprilia Hariani, 2023)

2.2 Pengertian pajak

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU KUP No. 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

pajak didefinisikan sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, yang dapat dipaksakan, tetapi tanpa mendapat prestasi kembali dari negara yang langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum (Alfons et al., 2018)

Ahmad Fikri mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, yang dapat dipungut dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Ahmad Fikri, 2024)

2.2.1. Fungsi Pajak

pengertian fungsi Pajak adalah memahami fungsi sebagai kegunaan sesuatu. Jadi fungsi perpajakan adalah manfaat utama, keuntungan utama dari perpajakan. Sebagai alat untuk menentukan kebijakan ekonomi, perpajakan memiliki manfaat dan keuntungan yang penting. Sebagai alat penentu kebijakan ekonomi, manfaat dan keuntungan utama perpajakan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suatu negara tentu berharap agar kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Pajak sebagai salah satu penerimaan pemerintah diharapkan dapat me-mungkinkan banyak pembangunan yang dapat dilakukan sesuai dengan tujuan negara. Perpajakan memiliki dua fungsi, yaitu:

- 1. Fungsi anggaran (budgetair) mengacu pada pajak sebagai sumber pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2. Fungsi mengatur (cregulerend) adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: Pajak yang tinggi dikenakan pada minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras dan pajak yang tinggi dikenakan pada barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.2.2. Hukum Perpajakan Indonesia

(Rachel Yolanda Pratiwi S, 2023) Menyatakan Bahwa Hukum pajak, yang juga dikenal sebagai hukum fiskal, adalah seperangkat peraturan yang mengatur kekuasaan kas negara untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya secara umum disebut wajib pajak).

Pajak bersifat wajib menurut undang-undang. Dasar hukum tertinggi dalam pemungutan pajak adalah Berdasarkan asas yuridis, pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 dan undang-undang yang

mengatur pemungutan pajak Penghasilan di Indonesia yaitu UU no 36 tahun 2008.Hak-hak wajib pajak harus dilindungi dan benar-benar dihormati, dan pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Direktur Jenderal Pajak Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang secara khusus berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut UU Pajak Penghasilan No.7 tahun 1983 pasal 1 yang telah diperbaharui menjadi UU No.36 tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau perseorangan dan perusahaan selama tahun pajak.(Republik Indonesia, 1983)

2.4 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pemotongan pajak (PPh) dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukannya. Misalnya, dalam hal ini, pembayaran yang terkait dengan upah atau gaji yang diterima oleh seorang karyawan dipotong oleh perusahaan pemberi kerja.

Wajib pajak badan ditunjuk oleh undang-undang perpajakan sebagai agen pemotongan untuk keperluan Pasal 21 Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang dibayarkan atau diterima oleh karyawan atau bukan karyawan. Namun, wajib pajak perorangan juga dapat ditunjuk sebagai agen pemotongan untuk tujuan Pasal 21 Pajak Penghasilan jika mereka mendapatkan penunjukan dari kantor pajak (KPP) tempat mereka terdaftar.(DJP, 2023)

2.5 Tarif Efektif Rata Rata (TER)

Tarif pajak efektif rata-rata (TER) untuk menghitung PPh Pasal 21 adalah metode yang digunakan untuk menyederhanakan perhitungan pajak bagi karyawan dan pensiunan. Sistem ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2024, menggantikan metode sebelumnya yang lebih rumit.

2.5.1 Golongan Tarif TER

TER dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):

TER A = PTKP : TK/0; TK/1 & K/0

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER A
1	sampai dengan 5.400.000	0,00%
2	5.400.001 - 5.650.000	0,25%
3	5.650.001 - 5.950.000	0,50%
4	5.950.001 - 6.300.000	0,75%
5	6.300.001 - 6.750.000	1,00%
6	6.750.001 - 7.500.000	1,25%
7	7.500.001 - 8.550.000	1,50%
8	8.550.001 - 9.650.000	1,75%
9	9.650.001 – 10.050.000	2,00%
10	10.050.001 - 10.350.000	2,25%
11	10.350.001 - 10.700.000	2,50%
12	10.700.001 - 11.050.000	3,00%
13	11.050.001 - 11.600.000	3,50%
14	11.600.001 - 12.500.000	4,00%
15	12.500.001 - 13.750.000	5,00%
16	13.750.001 - 15.100.000	6,00%
17	15.100.001 – 16.950.000	7,00%
18	16.950.001 - 19.750.000	8,00%
19	19.750.001 - 24.150.000	9,00%
20	24.150.001 - 26.450.000	10,00%
21	26.450.001 - 28.000.000	11,00%
22	28.000.001 - 30.050.000	12,00%

Tabel 2.1 Lapisan penghasilan Bruto dan Tarif Efektif Rata Rata (TER) A

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER A
23	30.050.001 - 32.400.000	13,00%
24	32.400.001 - 35.400.000	14,00%
25	35.400.001 – 39.100.000	15,00%
26	39.100.001 – 43.850.000	16,00%
27	43.850.001 – 47.800.000	17,00%
28	47.800.001 – 51.400.000	18,00%
29	51.400.001 - 56.300.000	19,00%
30	56.300.001 - 62.200.000	20,00%
31	62.200.001 - 68.600.000	21,00%
32	68.600.001 - 77.500.000	22,00%
33	77.500.001 – 89.000.000	23,00%
34	89.000.001 - 103.000.000	24,00%
35	103.000.001 - 125.000.000	25,00%
36	125.000.001 – 157.000.000	26,00%
37	157.000.001 - 206.000.000	27,00%
38	206.000.001 - 337.000.000	28,00%
39	337.000.001 - 454.000.000	29,00%
40	454.000.001 - 550.000.000	30,00%
41	550.000.001 - 695.000.000	31,00%
42	695.000.001 – 910.000.000	32,00%
43	910.000.001 – 1.400.000.000	33,00%
44	Lebih dari 1.400.000.000	34,00%

Tabel 2.2 Lapisan penghasilan Bruto dan Tarif Efektif Rata Rata (TER) A

TER B Untuk individu tidak kawin dengan dua atau lebih tanggungan, kawin dengan satu atau dua tanggungan.

TER B = PTKP : TK/2 & K/1; TK/3 & K/2

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER B
1	sampai dengan 6.200.000	0,00%
2	6.200.001 - 6.500.000	0,25%
3	6.500.001 - 6.850.000	0,50%
4	6.850.001 - 7.300.000	0,75%
5	7.300.001 – 9.200.000	1,00%
6	9.200.001 – 10.750.000	1,50%
7	10.750.001 – 11.250.000	2,00%
8	11.250.001 – 11.600.000	2,50%
9	11.600.001 – 12.600.000	3,00%
10	12.600.001 - 13.600.000	4,00%
11	13.600.001 – 14.950.000	5,00%
12	14.950.001 – 16.400.000	6,00%
13	16.400.001 – 18.450.000	7,00%
14	18.450.001 - 21.850.000	8,00%
15	21.850.001 – 26.000.000	9,00%
16	26.000.001 – 27.700.000	10,00%
17	27.700.001 – 29.350.000	11,00%
18	29.350.001 – 31.450.000	12,00%
19	31.450.001 – 33.950.000	13,00%
20	33.950.001 – 37.100.000	14,00%

Tabel 2.3 Lapisan Penghasilan Bruto Dan Tarif Efektif Rata Rata (TER) B

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER B
21	37.100.001 – 41.100.000	15,00%
22	41.100.001 – 45.800.000	16,00%
23	45.800.001 – 49.500.000	17,00%
24	49.500.001 – 53.800.000	18,00%
25	53.800.001 - 58.500.000	19,00%
26	58.500.001 - 64.000.000	20,00%
27	64.000.001 - 71.000.000	21,00%
28	71.000.001 - 80.000.000	22,00%
29	80.000.001 - 93.000.000	23,00%
30	93.000.001 – 109.000.000	24,00%
31	109.000.001 - 129.000.000	25,00%
32	129.000.001 - 163.000.000	26,00%
33	163.000.001 - 211.000.000	27,00%
34	211.000.001 - 374.000.000	28,00%
35	374.000.001 - 459.000.000	29,00%
36	459.000.001 – 555.000.000	30,00%
37	555.000.001 - 704.000.000	31,00%
38	704.000.001 – 957.000.000	32,00%
39	957.000.001 – 1.405.000.000	33,00%
40	Lebih dari 1.405.000.000	34,00%

Tabel 2.4 Lapisan Penghasilan Bruto Dan Tarif Efektif Rata Rata (TER) B

TER C Untuk individu kawin dengan tiga tanggungan.

TER C = PTKP : K/3

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER C
1	sampai dengan 6.600.000	0,00%
2	6.600.001 – 6.950.000	0,25%
3	6.950.001 - 7.350.000	0,50%
4	7.350.001 – 7.800.000	0,75%
5	7.800.001 - 8.850.000	1,00%
6	8.850.001 – 9.800.000	1,25%
7	9.800.001 – 10.950.000	1,50%
8	10.950.001 – 11.200.000	1,75%
9	11.200.001 – 12.050.000	2,00%
10	12.050.001 – 12.950.000	3,00%
11	12.950.001 – 14.150.000	4,00%
12	14.150.001 – 15.550.000	5,00%
13	15.550.001 – 17.050.000	6,00%
14	17.050.001 – 19.500.000	7,00%
15	19.500.001 – 22.700.000	8,00%
16	22.700.001 – 26.600.000	9,00%
17	26.600.001 – 28.100.000	10,00%
18	28.100.001 - 30.100.000	11,00%
19	30.100.001 – 32.600.000	12,00%
20	32.600.001 – 35.400.000	13,00%
21	35.400.001 – 38.900.000	14,00%

 $\textbf{Tabel 2.5} \; \textbf{Lapisan Penghasilan Bruto Dan Tarif Efektif Rata Rata (TER)} \; \textbf{C}$

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER C
22	38.900.001 - 43.000.000	15,00%
23	43.000.001 – 47.400.000	16,00%
24	47.400.001 – 51.200.000	17,00%
25	51.200.001 - 55.800.000	18,00%
26	55.800.001 - 60.400.000	19,00%
27	60.400.001 - 66.700.000	20,00%
28	66.700.001 - 74.500.000	21,00%
29	74.500.001 – 83.200.000	22,00%
30	83.200.001 - 95.600.000	23,00%
31	95.600.001 – 110.000.000	24,00%
32	110.000.001 - 134.000.000	25,00%
33	134.000.001 – 169.000.000	26,00%
34	169.000.001 - 221.000.000	27,00%
35	221.000.001 – 390.000.000	28,00%
36	390.000.001 - 463.000.000	29,00%
37	463.000.001 – 561.000.000	30,00%
38	561.000.001 - 709.000.000	31,00%
39	709.000.001 – 965.000.000	32,00%
40	965.000.001 – 1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari 1.419.000.000	34,00%

Tabel 2.6 Lapisan Penghasilan Bruto Dan Tarif Efektif Rata Rata (TER) C

2.6 CWU Pembangunan RSPTN, IRC, dan WWTP

2.6.1 Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) UNILA

Rumah sakit pendidikan dan penelitian pertama yang dibangun di Pulau Sumatera adalah RSPTN (Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri) di Universitas Lampung. Mendapat dana dari Asian Development Bank (ADB) di bawah Higher Education For Technology and Innovation (HETI) mendanai inisiatif ini. Tujuannya adalah untuk membuka RSPTN Unila pada akhir tahun 2026, atau mungkin sebelum itu.

Dengan kapasitas awal 100 tempat tidur, rumah sakit ini dimaksudkan untuk menjadi fasilitas tipe C dengan ambisi menjadi fasilitas tipe B. Penelitian

kesehatan langsung dimungkinkan oleh hubungan RSPTN Unila dengan Pusat Penelitian

2.6.2 CWU (Contract Work Unit)

CWU atau *Contract Work Unit* merupakan bagian dari proyek konstruksi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek-proyek tertentu sebagai unit kontraktor. Sebagai bagian dari IRC (*Integrated Resource Center*) konstruksi PT Nindya Karya dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), CWU berperan dalam mengelola seluruh aspek proyek mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga penyelesaian proyek.(Nindya Karya, 2023)

2.6.3 IRC (*Integrated Research Center*)

Integrated Research Center atau IRC adalah Badan Pusat penelitian terpadu yang dibangun sebagai bagian dari proyek Higher Education For Technology and Innovation (HETI) di Universitas Lampung. Integrated Research Center ini berfungsi untuk mendukung pengembangan akademik,termasuk pengadaan alat dan pelatihan terhadap staf yang terlibat dalam penelitian. Proyek ini didanani oleh Asian Development Bank (ADB) yang dirancang untuk ke efektifitasan penelitian di Universitas Lampung.

2.6.4 WWTP (Wastewater Treatment Plant)

Wastewater Treatment Plant (WWTP) atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah Instalasi pengolahan air limbah merupakan infrastruktur penting untuk mengolah air limbah dari berbagai kegiatan industri dan domestik. Tujuan PT Nindya Karya membangun instalasi pengolahan air limbah adalah untuk memastikan bahwa limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.(Bagaskara, 2023)

Instalasi pengolahan air limbah merupakan infrastruktur penting untuk mengolah air limbah dari berbagai kegiatan industri dan domestik. Tujuan PT Nindya Karya dalam membangun instalasi pengolahan air limbah adalah untuk memastikan bahwa limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan dan telah memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam Laporan Akhir ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari PT Nindya Karya (Pembangunan RSPTN UNILA) yang berlokasi di Jalur dua Univeristas Lampung, Jalan Prof. Dr Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141 melalui wawancara, observasi dan pencatatan dengan divisi keuangaan.

- Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari sumbernya melalui proses tanya jawab, sebagai pihak yang berkompeten dan bertanggung jawab atas data dan informasi pajak PT Nindya Karya.
- ii) Observasi, yaitu teknik memperoleh data melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap praktik PT Nindya Karya untuk mengetahui aktivitas perpajakan.
- iii) Data dokumenter, yaitu teknik pengumpulan data melalui literatur, jurnal, internet dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media atau secara tidak langsung berupa buku-buku referensi, catatan-catatan, bukti-bukti yang telah ada dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan untuk laporan penelitian selama praktik kerja lapangan di PT Nindya Karya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

Penulis mengumpulkan data-data untuk penelitian ini melalui wawancara dan observasi, kemudian melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang diperoleh dari PT Nindya Karya.

2. Penelitian pustaka

Penulis mengumpulkan data melalui jurnal-jurnal dan juga web perpajakan, seperti: Undang-Undang Pajak Penghasilan dan lainya terkait Pajak Penghasila Pasal 21.

3.3 Ojek Kerja Praktik

3.3.1 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktik

a. Lokasi Kerja Praktik

Lokasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis terletak di Jalur dua Univeristas Lampung, Jalan Prof. Dr Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

b. Waktu Kerja Praktik

Waktu Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) mulai Tanggal 13 Januari s.d 28 Februari 2025.

3.4 Gambaran Umum Lokasi Perusahaan PKL

PT Nindya Karya (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi dan jasa terkait. Didirikan pada tahun 1961, PT Nindya Karya memiliki reputasi dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, gedung, dan fasilitas

lainnya. Perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta dan memiliki beberapa cabang di seluruh Indonesia untuk mendukung kegiatan operasionalnya.

Lokasi pelaksanaan praktek kerja lapangan (PKL) adalah kantor cabang PT Nindya Karya yang bertanggung jawab atas proyek-proyek strategis di daerah tertentu. Kantor ini merupakan pusat pengelolaan administrasi dan operasional perusahaan, termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan yang mencakup aspek perpajakan.

Pemilihan lokasi PKL PT Nindya Karya didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:

3.4.1 Relevansi dengan topik penelitian

Sebagai mahasiswa D3 perpajakan, aspek perpajakan menjadi fokus dalam pengerjaan tugas akhir dan kegiatan PKL. PT Nindya Karya dipilih karena perusahaan ini memiliki sistem administrasi perpajakan yang kompleks, termasuk administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) untuk karyawan tetap. Hal ini memberikan kesempatan untuk melihat aplikasi praktis dari konsep-konsep perpajakan yang telah dipelajari di bangku kuliah.

3.4.2 Kesempatan untuk mendalami PPh Pasal 21

Dalam hal manajemen keuangan, PT Nindya Karya memiliki sistem pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 yang mencakup karyawan dengan tingkat penghasilan yang berbeda. Topik ini relevan dengan fokus Pajak Penghasialan Pasal 21, yaitu pemotongan pajak PPh Pasal 21 dengan tarif pajak efektif rata-rata (TER). Pilihan fokus ini memberikan kesempatan untuk mempelajari praktik manajemen pajak perusahaan-perusahaan besar secara lebih rinci.

3.4.3 Kompleksitas dan ukuran perusahaan

Sebagai perusahaan berskala nasional, PT Nindya Karya memiliki struktur organisasi yang besar dan proses kerja yang sistematis. Hal ini memberikan pengalaman yang berharga dalam memahami tantangan dan solusi pengelolaan pajak, khususnya PPh Pasal 21.

Pemilihan fokus penelitian pada PPh 21 di PT Nindya Karya, dibandingkan fokus lainnya atau di lokasi lain, dilakukan karena topik ini memiliki keterkaitan langsung dengan studi perpajakan

3.5 visi dan misi Perusahaan

3.5.1 visi PT Nindya Karya

"Menjadi Perusahaan Global di Bidang Konstruksi dan Investasi berbasis Engineering yang Terpercaya, Terkemuka dan Berkelanjutan". Visi Perusahaan dirumuskan berdasarkan melalui kajian-kajian di internal Perusahaan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan tim perumusan yang berasal dari Tim Business Continuity Management/BCM PT Nindya Karya.

3.5.2 Misi PT Nindya Karya

- 1. Meningkatkan Nilai tambah Bagi Stakeholders secara berkelanjutan berbasis Excellence Engineering dengan inovasi serta Human Capital yang unggul dan berakhlak.
- 2. Mengembangkan industri kontruksi dan investasi yang berstandar global dan berdaya saing tinggi dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.serta kelestarian lingkungan berkelanjutan.

Misi Perusahaan dirumuskan berdasarkan melalui kajian-kajian di internal perusahaan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan tim perumusan yang berasal dari Tim Business Continuity Management / BCM PT Nindya Karya.

3.6 Logo PT Nindya Karya



Gambar 3.4 Logo Perusahaan PT Nindya Karya

Logo PT Nindya Karya (Persero) memiliki bentuk yang cukup modern, dengan inisial perusahaan "N" yang ditampilkan di dalam lingkaran hijau dan kata "NINDYA" di pojok bawah. Setiap dekorasi ini memiliki arti atau makna tersendiri.

3.6.1 Makna Bentuk Logo Nindya Karya



Gambar 3.5 Makna Logo PT Nindya Karya

Pertama adalah bentuk huruf N. Huruf N merupakan singkatan dari NINDYA, yang merupakan julukan PT Nindya Karya (Persero) yang digunakan oleh masyarakat. Huruf N digambarkan dengan bentuk miring ke atas dan tidak terputus, melambangkan pertumbuhan yang dinamis dan kinerja yang terus meningkat.

Kedua, lingkaran melambangkan operasional bisnis NINDYA yang beretika melalui koridor pemenuhan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, dan penerapan prinsip-prinsip GCG. Selain itu, lingkaran juga

melambangkan kerja sama tim yang solid dalam satu visi dan misi yang sama. Posisi lingkaran miring ke atas, melambangkan bahwa NINDYA menjalankan bisnis dalam dunia yang dinamis dan terus berkembang.

Ketiga, kata NINDYA terletak di pojok bawah. Kata Nindya merupakan julukan atau moniker yang digunakan oleh PT Nindya Karya (Persero) di kalangan masyarakat luas Indonesia. Kata NINDYA berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti "kesempurnaan".

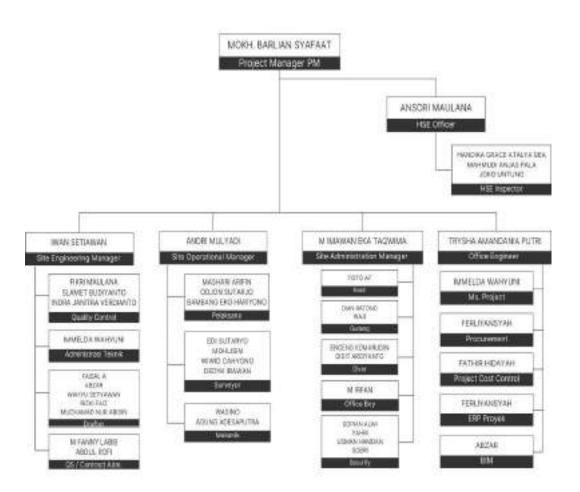
Semoga informasi ini dapat membantu Anda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang PT Nindya Karya (Persero).

3.7 Struktur Organisasi

PT Nindya Karya saat ini sedang melaksanakan proyek CWU Pembangunan RSPTN, IRC, dan WWTP di Universitas Lampung dengan strruktur organisasi sebagai berikut.

STRUKTUR ORGANISASI

CWU Pembangunan RSPTN, IRC, dan WWTP Universitas Lampung



Gambar 3.6 Struktur Organisasi CWU Pembangunan RSPTN,IRC,DAN WWTP Universitas Lampung

• Project Manager (PM)

Project Manager adalah pimpinan tertinggi dalam proyek yang bertanggung jawab atas keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penyelesaian proyek sesuai dengan target biaya, waktu, dan mutu yang telah ditentukan. Adapun tugas Project Manager yaitu mengawasi dan mengkoordinasikan seluruh aspek di proyek, menjaga agar proyek berjalan sesuai jadwal, berkomunikasi dengan klien, subkontraktor dan stakeholder lainnya, dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam proyek.

• HSE Office

Health, Safety, and Environment (HSE) adalah divisi yang bertanggung jawab atas kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan dalam proyek. Bertugas untuk menyusun dan mengawasi penerapan kebijakan k3 (keselamtan dan kesehatan kerja), memastikan bahwa seluruh pekerja mengikuti prosedur keselamatan, melakukan inspeksi rutin terhadap area kerja dan peralatan, dan menginvestigasi kecelakaaan kerja dan membuat laporan.

1. HSE Inspektor

Mengawasi implementasi keselamatan kerja di lapangan, memberikan pelatihan keselamatan kepada pekerja, dan mengidentifikasi potensi bahaya dan memberikan rekomendasi perbaikan.

• Site Engineering Manager (SEM)

Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengawasan pada aspek teknis proyek, termasuk rekayasa dan pengendalian mutu. Bertugas untuk menyusun perencanaan teknis proyek, mengawasi tim dan memastikan desain sesuai spesifikasi, berkoordinasi dengan tim pelaksana dan memastikan pekerjaan sesuai rencana, dan memeriksa kualitas hasil pekerjaan.

1. Quality Control

Memastikan setiap pekerjaan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dan melakukan inspeksi dan uji kelayakan terhadap material dan hasil pekerjaan

2. dministrator Engineering

Mengelola dokumen proyek, membantu dalam penyusunan laporan teknis, dan berkoordinasi dengan tim engineering dalam pengarsipan dokumen

3. Drafter

Membuat gambar teknik dan desain berdasarkan spesifikasi proyek dan mengupdate gambar kerja sesuai dengan perubahan desain.

4. QS/Contract Admin

Menyusun perhitungan kuantitas pekerjaan (Quantity Surveyor), menyiapkan dan mengelola dokumen kontrak proyek, dan menghitung biaya proyek dan membuat laporan estimasi anggaran.

• Site Operational Manager (SOM)

Bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek dilapangan, termasuk pengawasan tenaga kerja dan penggunaan material. Bertugas mengawasi jalannya proyek di lapangan agar sesuai jawal dan spesifikasi, berkoordinasi dengan tim engineering dan administrasi, dan mengatasi kendala teknis dalam pelaksanaan proyek

1. Pelaksana

Memimpin tenaga kerja dan memastikan pekerjaan dilakukan sesuai rencana dan mengawasi penggunaan material serta alat berat dilapangan.

2. Surveyor

Melakukan pengukuran dan pemetaan lokasi proyek dan menyediakan data teknis untuk perencanaan atau pelaksanaan proyek.

3. Mekanik

Melakukan perawatan dan perbaikan alat berat serta peralatan mekanik di proyek dan memastikan semua mesin serta alat dalam kondisi normal.

• Site Administrator Manager (SAM)

Divisi ini bertanggung jawab atas administrasi proyek, termasuk keuangan, logistik, dan sumber daya manusia. Bertugas untuk mengelola administrasi keuangan proyek, mengawasi pengelolaan gudang dan logistik, dan mengkoordinasikan kebutuhan operasional proyek.

1. Kasir

Mengelola keuangan proyek, termasuk pembayaran dan pencatatan

2. Gudang

Mengelola penyimpanan dan distribusi material proyek dan memonitor stok barang dan membuat laporan persediaan.

3. Driver

Mengoperasikan kendaraan untuk keperluan operasional proyek dan mengangkut material serta peralatan sesuai kebutuhan.

4. Office Boy

Membantu tugas operasional kantor proyek, seperti kebersihan dan penyediaan kebutuhan kantor.

5. Security

Menjaga keamanan proyek dan aset perusahaan serta mengawasi akses keluar masuk area proyek.

• Office Engineering (OE)

Divisi ini menangani aspek teknis dan administrasi dalam perencanaan proyek. Bertugas dalam menyusun jadwal proyek serta memastikan ketercapaian target dan mengelola sistem informasi proyek dan koordinasi antar tim

1. Ms Project

Menggunakan software Microsoft Project untuk menyusun jadwal dan pelacakan proyek serta mengupdate timeline proyek dan melakukan evaluasi keterlambatan.

2. Procurement

Bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan proyek serta bernegosiasi dengan vendor dan pemasok untuk mendapatkan harga terbaik

3. Project Cost Control

Mengontrol biaya proyek agar tidak melebihi anggaran yang ditetapkan serta menganalisis dan membuat laporan keuangan proyek.

4. ERP Proyek

Mengelola sistem Enterprise Resource Planning (ERP) untuk mendukung pengelolaan proyek serta memastikan data proyek terdokumentasi secara sistematis.

5. BIM

Menggunakan teknologi Building Information Modeling (BIM) untuk perencanaan proyek serta mengembangkann model digital proyek guna meningkatkan efisiensi desain dan pelaksanaan.

BAB V KESIMPULAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB Sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proses penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dengan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) untuk karyawan tetap PT Nindya Karya telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Akurasi dan konsistensi perhitungan pajak Dengan menggunakan TER, pemotongan pajak menjadi lebih stabil setiap bulannya, sehingga menghindari lonjakan pajak di akhir tahun. Hal ini memberikan keamanan bagi perencanaan keuangan karyawan dan mempermudah pengelolaan pajak bagi perusahaan.

Proses Pemotongan Pajak Ada dua metode untuk memotong pajak: Yaitu dengan Tarif Efektif Rata Rata (TER) digunakan dari bulan Januari hingga November dan Tarif Pasal 17 atau Tarif Progresif untuk bulan Desember untuk memastikan pemotongan pajak sesuai dengan total penghasilan karyawan dalam setahun.

Karyawan mendapat manfaat dari pengurangan pajak yang stabil, sehingga laba bersih mereka tidak berfluktuasi secara liar dari bulan ke bulan. Selain itu, TER ini mengurangi risiko kekurangan pembayaran pajak, yang dapat mengakibatkan pengeluaran tambahan di akhir tahun.

PT Nindya Karya mendapat manfaat dari TER karena memudahkan pengelolaan pajak karyawan dan mengurangi risiko kesalahan administrasi. Menggunakan Tarif Efektif Rata Rata ini juga membantu perusahaan untuk lebih mematuhi peraturan perpajakan dan menghindari potensi denda atas kesalahan dalam pemotongan pajak.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran pertama untuk lebih teliti dan selalu update akan info-info terbaru tentang perpajakan Selanjutnya yaitu Update data karyawan secara berkala, Perusahaan harus melakukan update data karyawan secara berkala agar perhitungan pajak yang dilakukan tetap akurat dan update.

Dan mungkin yang terakhir Perusahaan harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pemotongan pajak yang diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Apabila terjadi perubahan kebijakan perpajakan pemerintah, PT Nindya Karya harus segera melakukan penyesuaian agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dengan menerapkan rekomendasi di atas, PT Nindya Karya berharap dapat terus mengelola kewajiban perpajakan karyawannya dengan lebih baik dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fikri. (2024). *Definisi Pajak Menurut Rochmat Soemitro: Memahami Konsep Pajak dengan Santai March 25, 2024 by Ahmad Fikri*. RedaSamudera.Id. https://redasamudera.id/definisi-pajak-menurut-rochmat-soemitro/
- Alfons, W. A. H., Runtu, T., & Afandy, D. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Cv Unggul Abadi Di Manado. *Going Concern:***Jurnal Riset Akuntansi, 13(02), 668–682.

 https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19927.2018
- Aprilia Hariani. (2023). *Perbedaan Pemotongan dan Pemungutan Pajak*. PAJAK.COM. https://www.pajak.com/pajak/perbedaan-pemotongan-dan-pemungutan-pajak/
- Bagaskara. (2023). *Apa Itu Wastewater Treatment Plant, Apa Kegunaannya?* Mutu Internasional. https://mutucertification.com/apa-itu-wastewater-treatment-plant/
- DJP. (2023). *PPh Pasal* 21. Pajak.Go.Id. https://pajak.go.id/en/node/34300?utm_source
- Nindya Karya. (2023). COMPANY PROFILE PT NINDYA KARYA General Contractor-EPC-Investment. 1–154.
- Rachel Yolanda Pratiwi S. (2023). *Hukum Perpajakan Indonesia*. PAJAK.COM. https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/hukum-perpajakan-indonesia/
- Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Perubahan Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.* 88, 88. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/29283/UU Nomor 36 Tahun 2008.pdf